



DAMPAK PANDEMI

Hotel-Resto Kian Kembang Kempis

JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan khusus untuk kembali menggerakkan aktivitas hotel dan restoran. Salah satu yang mereka minta adalah soal relaksasi, salah satunya keringanan beban listrik.

*Herlambang Jati Kusumo
herlambang.jati@harianjogja.com*

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo mengatakan hingga kini, kondisi hotel dan resto masih berat di tengah pandemi Covid-19, oleh karenanya perlu kebijakan dari pemerintah yang mampu menggerakkan aktivitas hotel.

"Kami memberi harga promo, karena kondisi masyarakat daya belinya juga masih rendah. Sehingga kami perlu juga bantuan, uluran dari pemerintah, seperti kebijakan relaksasi, keringanan beban listrik, dan lain sebagainya," ujar Deddy,

Hingga kini setidaknya sudah ada 50 hotel dan restoran yang tutup permanen.

Sampai saat ini belum ada kejelasan soal dana hibah pariwisata 2021.

Kamis (25/2).

Selain itu, Deddy mengharapkan pemerintah juga dapat mendukung agar *cash flow* hotel dan restoran dapat bergerak dengan menyelenggarakan kegiatan *meeting, incentive, convention and exhibition* (MICE), atau dapat melakukan *staycation* di hotel.

Dia mengakui, hingga kini setidaknya ada 50 hotel dan restoran yang tutup permanen, sekitar 100 tutup sementara, sementara sisanya, sekitar 200 unit masih dapat buka, tetapi dengan kondisi yang kembang kempis. "Meski dalam kondisi yang berat, kami berusaha tetap guyub *sesarengan*, saling menguatkan saling membantu. Kami ini Supertim bukan Superman, guyub semua asosiasi, pemda, Pemkab," ujar Deddy.

Dana Hibah Pariwisata

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY, Singgih Raharjo juga mendorong aktivitas di hotel agar dapat bergerak, seperti melakukan kegiatan MICE di hotel. "Kami mendorong MICE, tetapi itu kembali lagi berkaitan penganggaran yang ada di OPD [organisasi perangkat daerah] masing-masing, prinsipnya kemudian bisa dioptimalkan fasilitas MICE yang ada di hotel bagus, *spending government* menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Namun, jangan memaksakan juga, nanti belakang hari ada administrasi yang terganggu atau yang lainnya," ujar Singgih.

Disinggung soal kebijakan dan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa dana hibah pariwisata. Singgih mengaku hingga kini masih menunggu informasi selanjutnya. "Belum ada informasi lagi di tahun ini, tetapi untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional memang tetap menyasar salah satunya juga sektor pariwisata," ujarnya. Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Tri Saktiyana, mengatakan hibah pariwisata untuk tahun ini belum ada. Hibah pariwisata 2020 kata dia, sudah tersalurkan semua. "Akhir tahun lalu yang menerima satu kota dan dua kabupaten," katanya, beberapa hari lalu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005